

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan maka didapatkan hasil laporan terhadap evaluasi tingkat kepatuhan penggunaan APD tenaga kerja konstruksi pada Pembangunan TAHAP KE 2 GEDUNG LABORATORIUM TERPADU POLTEKKES KEMENKES JAMBI, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi tingkat kepatuhan penggunaan APD tenaga kerja konstruksi.
 - a. Kondisi tingkat kepatuhan penggunaan APD masih kurang.
2. Strategi yang dapat digunakan dalam meningkatkan kepatuhan penggunaan APD bagi tenaga kerja konstruksi:
 - a. Penambahan anggaran dana pada paket kegiatan,
 - b. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan APD dengan sosialisasi dan pelatihan secara berkelanjutan,
 - c. Penambahan jumlah logo-logo K3, spanduk K3, banner K3 dan larangan tidak menggunakan peralatan K3,
 - d. Menambah jumlah tenaga K3,
 - e. Memberikan penghargaan individu maupun tim bagi yang mentaati pengguna APD minimal 1 bulan sekali,
 - f. Menaikan Jumlah upah/gaji karyawan dan tenaga kerja.



5.2 Saran

Saran – saran yang dapat dikemukakan dari hasil laporan ini adalah sebagai berikut:

1. PT. BURNIAT INDAH KARYA untuk selalu menggiatkan penggunaan APD dengan salah satu cara membuat peraturan dan saksi yang tegas.

5.3 Keterbatasan Masalah

Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan yang ada pada laporan ini diantaranya

1. Penentuan populasi dan sampel belum mencakup keseluruhan laporan ini.
2. Keterbatasan waktu serta masih lemahnya item yang dijadikan indikator pada laporan ini sehingga indikator tersebut masih kurang dalam mengevaluasi tingkat kepatuhan penggunaan APD tenaga kerja konstruksi.
3. Penyaringan beberapa jawaban yang dilakukan penulis belum sempurna sehingga ada jawaban responden menjadi bias dalam pelaporan ini.

5.4 Rekomendasi untuk laporan teknik lebih lanjut

Diharapkan pada laporan yang akan datang dapat melakukan laporan yang lebih baik dengan menambah indikator lain dan alat analisis lain dalam mengevaluasi tingkat kepatuhan penggunaan APD tenaga kerja konstruksi sehingga dapat diambil suatu kebijakan yang general untuk tingkat kepatuhan penggunaan APD tenaga kerja konstruksi.

